

BAB I

PENDAHULUAN

Komunitas pertambangan di Australia menjadi salah satu kelompok kepentingan yang banyak mempengaruhi kebijakan pemerintah terutama kebijakan yang terkait dengan keberlangsungan aspek pertambangan. Hal tersebut dikarenakan sektor pertambangan merupakan salah satu aspek penting bagi Australia. Pada masa kepemimpinan Kevin Rudd, Rudd menggagas gagasan *Resource Super Profit Tax (RSPT)*. Gagasan tersebut menyebabkan adanya pertentangan dari komunitas pertambangan. Gagasan RSPT mewajibkan perusahaan tambang membayar pajak sebesar 40%. Pajak tersebut dinilai sangat tinggi bahkan merupakan pajak korporasi tertinggi di dunia dan akan berimbas pada keberlangsungan pertambangan di Australia.

Berimbasnya pajak yang sangat tinggi tersebut terhadap perusahaan tambang akan membuat Australia kehilangan pendapatan yang sangat besar dari sector pajak. Kenaikan pajak tambang sebesar 40% di nilai akan membunuh sektor tambang di Australia. Padahal besaran pajak korporasi di Australia adalah sebesar 30%. Beberapa komunitas pertambangan yang sangat dominan dalam menyuarakan ketidaksetujuan mereka terkait gagasan RSPT seperti misalnya *Mineral Council of Australia* melakukan upaya-upaya dalam menggagalkan gagasan tersebut. Upaya-upaya tersebut kemudian menjadi penghambat bagi penerapan gagasan RSPT yang rencananya akan mulai di terapkan pada tahun 2012.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Komunitas pertambangan merupakan salahsatu komunitas yang anggota-anggotanya merupakan perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada di Australia. Australia memiliki beberapa komunitas pertambangan, antara lain yaitu Australian Coal Association (ACA), Bespoke Approach, Australian Chamber of Commerce and Industry (ACCI), Mineral Council of Australia (MCA), Bussiness Council of Australia, Australian Mining and Exploration Companies (AMEC), The AusIMM, World Coal Association, International Council on Mining and Metals (ICMM). Komunitas-komunitas pertambangan merupakan salah satu wadah bagi perusahaan pertambangan untuk menyampaikan kepentingan mereka kepada pembuat keputusan politik. Dengan bergabungnya perusahaan-perusahaan pertambangan ke dalam komunitas pertambangan maka mereka akan lebih mudah mencapai kepentingan apabila mereka bekerja secara kolektif.

Australia merupakan Negara yang sangat kaya dengan sumber daya mineral hingga pertambangan berkembang sangat pesat di Australia Sejak 1990, terdapat 3000 perusahaan tambang di Australia dan 83% di antaranya merupakan perusahaan milik investor asing. Pertambangan memililiki arti yang cukup penting bagi Australia. Hal tersebut dapat dilihat dari Kemajuan perekonomian Australia dimana dapat dilihat dari ekonomi riil Australia yang tumbuh rata-rata 3,3 persen per tahun dimana Nilai GDP Australia pada 2006-07 berada di atas \$1 triliun, menjadikannya ekonomi terbesar ke 13 secara keseluruhan di dunia dan terbesar ke 10 diantara ekonomi Negara Industri. Pendapatan pemerintah Australia dari pajak pertambangan bahkan meningkat sebagai akibat dari peningkatan ekspor batubara dan bijih besi yang menghasilkan AU\$ 126 milyar di tahun 2012-2013 bahkan Sepanjang tahun 2015-2016

industri sumberdaya alam Australia mengapalkan barang senilai AU\$ 250 milyar ke seluruh dunia. Bijih besi, batubara dan LNG merupakan tulang punggung kenaikan pendapatan pemerintah Australia. Pengapalan LNG menghasilkan AU\$ 21,1 milyar pada 2015 2016 ekspor bijih besi naik 40% menghasilkan AU\$ 77,8 milyar, sementara penjualan batubara mengalami kenaikan 35% menjadi AU\$ 65,6 milyar pada tahun 2015. ¹

Pada masa kepemimpinannya, Kevin Rudd mengagas sebuah gagasan bernama Resource Super Profit Tax. Gagasan ini merupakan reformasi pajak pertambangan di Australia di mana setiap perusahaan yang mengekspor sumber daya mineral non-terbarukan berkewajiban membayar pajak sebesar 40%, pajak ini akan berlaku bagi perusahaan yang *return of investment*-nya di atas 5%. Gagasan ini mendapatkan pertentangan dari perusahaan-perusahaan pertambangan. Dari perhitungan komunitas pertambangan RSPT akan membuat perusahaan tambang kehilangan 63% dari penghasilan yang mereka dapatkan. Oleh karena itu, mereka bekerja secara kolektif melalui komunitas pertambangan yang ada di Australia untuk menggagalkan gagasan tersebut. Salah satu langkah penting yang membuktikan bahwa komunitas pertambangan berkerja bersama-sama dalam menggagalkan gagasan RSPT adalah Pada 16 – 17 Juni 2010 The Australian Institute of Mining and Metology atau The AusIMM yang merepresentasikan 10.000 pekerja pertambangan secara global yang dimana di dalamnya beranggotakan komunitas pertambangan di Australia serta perusahaan tambang. Organisasi ini melakukan konvensi di Adelaide, South Australia. Konvensi tersebut diikuti oleh perusahaan-perusahaan pertambangan yang dikenakan wajib pajak RSPT. Dalam konvensi tersebut disimpulkan bahwa RSPT bukanlah sebuah reformasi pajak melainkan bentuk ketidakadilan bagi keseluruhan negara Australia.

¹Rumah Pajak. (2010, July 3). Pajak Tambang Aussie Tetap 30%.

Pada konvensi tahun 2010 tersebut The AusIMM merepresentasikan 10.000 resolusi dari anggota-anggotanya yaitu “*that this congress condemns the proposed super tax because of the adverse impact it will have on all Australian communities*”. Beberapa perusahaan besar seperti BHP Billiton, Xstrata, serta Riotinto mengancam akan menarik investasi senilai 20 miliar USD. Meskipun komunitas-komunitas pertambangan berbeda satu sama lain, mereka memiliki tujuan dan kepentingan yang sama untuk menggagalkan RSPT. Hal tersebut dapat dilihat dari konvensi yang dilaksanakan oleh The AusIMM.

Gagasan RSPT yang awalnya akan diterapkan pada tahun 2012 kemudian gagal diterapkan. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya tekanan-tekanan dari komunitas-komunitas pertambangan di Australia. Di samping itu juga, dengan penerapan pajak yang tinggi maka akan mengurangi pendapatan Australia dari sector pertambangan. Kontroversi terkait gagasan RSPT juga ikut mempengaruhi popularitas daripada penggagasnya yaitu Kevin Rudd. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya dukungan parlemen sebesar 30% terhadap Kevin Rudd. Dilansir dari survei nasional Ace Nielsen yang dilaksanakan pada 3 hingga 5 Juni 2010, sebanyak 53% calon pemilih lebih cenderung pada oposisi daripada partai buruh yang tengah berkuasa. Hingga akhir Juni 2010 popularitas partai buruh terus menurun dari 39% menjadi 36%.

Gagasan RSPT dianggap sebagai hal yang sangat memalukan bagi partai buruh. Oleh karena itu dari partai buruh muncul Julia Gillard yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Australia yang menggagas gagasan Minerals Resource Rent Tax (MRRT). Pajak ini berkisar pada angka 30%. Selain itu, pajak ini akan ditujukan bagi perusahaan-perusahaan yang *Return on Investment*-nya di atas 12%. Perusahaan-perusahaan tambang raksasa di Australia merespon baik gagasan ini. Dengan menurunnya popularitas Kevin Rudd,

maka komunitas-komunitas pertambangandapat dikatakan telah menggagalkan gagasan tersebut apalagi dengan munculnya sebuah gagasan baru yaitu MRRT yang membuat RSPT tidak diterapkan pada tahun 2012.

Gagalnya gagasan RSPT tentu tidak lepas dari tekanan dari komunitas pertambangan. Maka dari itu, komunitas-komunitas pertambangan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi pembuat keputusan politik. Di samping memiliki kemampuan politik komunitas pertambangan juga melakukan upaya-upaya untuk menggagalkan gagasan RSPT. Upaya-upaya tersebut terbukti berhasil karena Kevin Rudd sebagai penggagas kehilangan popularitasnya sebagai Perdana Menteri Australia hingga munculnya gagasan baru sebagai pengganti gagasan RSPT yaitu gagasan MRRT.

Berdasarkan latar belakang diatas maka judul penelitian ini adalah

“UPAYA-UPAYA KOMUNITAS PERTAMBANGAN DALAM MENGGAGALKAN GAGASAN *RESOURCE SUPER PROFIT TAX* (RSPT) DI AUSTRALIA PADA MASA KEPEMIMPINAN KEVIN RUDD TAHUN 2007-2010”

B. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengupas lebih dalam mengenai kebijakan *Resource Super Tax* di Australian serta mengetahui upaya-upaya komunitas tambang dalam menggagalkan gagasan RSPT. Disamping itu juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan politik kelompok-kelompok yang kontra terhadap rencana kebijakan tersebut agar kebijakan tersebut tidak di terapkan pada tahun 2012. Serta mengetahui bagaimana perpolitikan di Australia.

C. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas maka terumuskan sebuah pokok permasalahan yaitu

“Bagaimana upaya-upaya komunitas pertambangan dalam menggagalkan gagasan *Resorce Super Profit Tax* pada masa kepemimpinan Kevin Rudd”?

D. KERANGKA TEORI

Untuk menjawab pertanyaan di atas penulis menggunakan konsep kelompok kepentingan menurut Mohtar Mas’oed dan Colen Mac Andrew.² Di mana dalam buku yang berjudul *Perbandingan Sistem politik* dijelaskan bahwa kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa, pada waktu yang sama berkehendak memperoleh jabatan. Kelompok kepentingan terbentuk untuk lebih memperkuat dan mengefektifkan tuntutan-tuntutan individual. Tuntutan-tuntutan tersebut muncul ketika masyarakat mulai mengenal industrialisasi dan ruang lingkup kegiatan pemerintahan meluas, serta jumlah dan jenis kelompok kepentingan yang tumbuh pesat.

Kelompok-kelompok kepentingan berbeda antara satu sama lain dalam hal struktur, gaya, pembiayaan, serta basis dukungan. Disamping itu juga kelompok kepentingan di organisir berdasarkan keanggotaan, kesukuan, ras, agamas, etnis, ataupun berdasarkan isu-isu kebijaksanaan. Kelompok kepentingan yang paling kuat, paling besar, dan paling mampu adalah kelompok yang berdasar pada bidang pekerjaan atau profesi.

Berikut ini merupakan jenis-jenis kelompok kepentingan menurut Mohtar Mas’oed dan Kevin Mac Andrew.

²Mas'oed, M., & Andrews, C. M. (1995). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

1. Kelompok Anomik

Kelompok-kelompok anomik ini terbentuk dalam masyarakat secara spontan. Kelompok ini juga tidak memiliki nilai-nilai dan Norma yang mengatur disamping itu juga bentuk partisipasi politik yang dilakukan adalah bentuk non- konvensional seperti kerusuhan dan demonstrasi.

2. Kelompok Non-Asosiasional

Kelompok non- asosional juga jarang yang terorganisir rapih dan kegiatannya bersifat kadang kala. Kelompok ini berujud kelompok-kelompok keluarga, keturunan, etnikregional, dan status. misalnya permintaan dari beberapa Tuan tanah kepada seorang birokrat dalam suatu klub informal tentang hasil pertanian dan sebagainya. Meskipun kelompok non-asosiasional merupakan masyarakat yang belum maju, kelompok-kelompok non asosiasional seperti keluarga-keluarga berpengaruh serta tokoh-tokoh regional dan pemimpin-pemimpin agama seringkali menerapkan pengaruh yang lebih besar daripada pengaruh perkumpulan serikat buruh dan sebagainya. Pertemuan-pertemuan serta pesta-pesta tidak resmi seringkali menciptakan kondisi yang memungkinkan pembicaraan tawar menawar antara pembuat keputusan dan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang sama.

3. Kelompok Institusional

Kelompok ini bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik atau lain disamping artikulasi kepentingan. Kelompok ini juga menyatakan kepentingan sendiri meupun mewakili kepentingan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Organisasi organisasi seperti partai

politik, Korporasi bisnis, badan militer, birokrasi, dan gereja merupakan bentuk-bentuk kelompok kepentingan institusional. Kelompok kepentingan jenis ini memiliki pengaruh yang besar karena memiliki basis organisasi yang kuat.

4. Kelompok Asosiasional

Kelompok asosiasional meliputi serikat buruh, kamar dagang, atau perkumpulan usahawan dan industrialis. Secara khusus kelompok ini menyatakan kepentingan dari suatu kelompok khusus dan bekerja secara penuh, dan memiliki prosedur teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan mereka. Contohnya adalah federasi besi dan baja di Inggris yang beranggotakan direktur-direktur dari perusahaan-perusahaan terkemuka yang melakukan perundingan dengan pemerintah tentang masalah-masalah yang mempengaruhi secara keseluruhan. Kegiatan politik utama dari kelompok kepentingan ini adalah melakukan tawar-menawar dengan pejabat pemerintah tentang peraturan pemerintah serta usul rencana undang-undang.

Kelompok kepentingan harus mampu mencapai atau berhubungan secara langsung dengan pembuat keputusan politik. Kelompok kepentingan memiliki taktik serta pengaruh yang berbeda-beda dalam mempengaruhi pembuat keputusan politik. Kelompok kepentingan berusaha mencari saluran-saluran khusus untuk menyalurkan kepentingan mereka serta mengembangkan teknik-teknik yang dilakukan agar kepentingan mereka dipahami oleh pembuat keputusan politik.

Berikut merupakan saluran-saluran penting untuk menyalurkan kepentingan kelompok kepentingan:

1. Demonstrasi dan Tindak Kekerasan

Tindakan demonstrasi merupakan sarana untuk menyampaikan tuntutan. Tindak demonstrasi merupakan sarana menyatukan tuntutan yang dipakai oleh setiap kelompok kepentingan

2. Hubungan Pribadi

Sarana kedua untuk mencapai kepentingan yaitu mencapai elit politik melalui hubungan pribadi misalnya dengan menggunakan keluarga, sekolah, hubungan-hubungan kedaerahan, dll. Tuntutan yang disampaikan oleh seorang teman atau anggota keluarga akan lebih efektif penyampaiannya daripada penyampaian secara formal oleh orang asing.

3. Perwakilan Langsung

Perwakilan langsung artinya adalah representasi secara langsung dalam badan pemerintahan birokrasi yang akan memungkinkan kelompok kepentingan untuk mengkomunikasikan kepentingan mereka secara terus menerus melalui perwakilan tersebut contohnya di Italy, dimana serikat buruh secara kontinyu terwakili dalam komisi-komisi parlemen.

4. Saluran Formal dan Institusional lainnya.

Pranata atau institusi adalah norma atau aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Norma/aturan dalam pranata berbentuk tertulis (undang-undang dasar, undang-undang yang berlaku, sanksi sesuai hukum resmi yang berlaku) dan tidak tertulis (hukum adat, kebiasaan yang berlaku, sanksinya ialah sanksi sosial/moral (misalkan dikucilkan). Pranata bersifat mengikat dan relatif lama serta memiliki ciri-ciri tertentu yaitu simbol, nilai, aturan main, tujuan, kelengkapan, dan umur. Institusi dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah

Institusi formal di mana institusi ini adalah suatu institusi yang dibentuk oleh pemerintah atau oleh swasta yang mendapat pengukuhan secara resmi serta mempunyai aturan-aturan tertulis/resmi.

Institusi yang kedua adalah Institusi pemerintah. Dimana institusi ini adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan suatu kebutuhan yang karena tugasnya berdasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan melakukan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan kebahagiaan kesejahteraan masyarakat. Institusi Pemerintah atau Lembaga Pemerintah dibedakan menjadi dua macam, yaitu Lembaga pemerintah yang dipimpin oleh seorang menteri Lembaga pemerintah yang tidak dipimpin oleh seorang menteri, dan bertanggung jawab langsung kepada presiden (disebut Lembaga Pemerintah Non-Departemen).

Institusi ketiga adalah Institusi swasta. Dimana institusi swasta adalah institusi yang dibentuk oleh swasta (organisasi swasta) karena adanya motivasi atau dorongan tertentu yang didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Institusi atau lembaga ini secara sadar dan ikhlas melakukan kegiatan untuk ikut serta memberikan pelayanan masyarakat dalam bidang tertentu sebagai upaya meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Contoh : Yayasan Penderita Anak Cacat, Lembaga Konsumen, Lembaga Bantuan Hukum, Partai Politik.

Kemudian yang keempat adalah Institusi non-formal. Dimana institusi non-formal adalah suatu institusi yang tumbuh di masyarakat karena masyarakat membutuhkannya sebagai wadah untuk menampung aspirasi mereka. Ciri-ciri institusi non-formal antara lain Tumbuh di dalam masyarakat karena masyarakat membentuknya, sebagai wadah untuk menampung aspirasi

mereka. Lingkup kerjanya, baik wilayah maupun kegiatannya sangat terbatas, Lebih bersifat sosial karena bertujuan meningkatkan kesejahteraan para anggota, disamping itu juga Pada umumnya tidak mempunyai aturan-aturan formal (Tanpa anggaran dasar/Anggaran rumah tangga).

Dalam menyampaikan kepentingannya, kelompok kepentingan bisa menggunakan institusi swasta di mana institusi swasta adalah institusi yang dibentuk oleh swasta karena adanya motivasi atau dorongan tertentu yang didasarkan atas suatu aturan perundang-undangan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Institusi atau lembaga ini secara sadar dan ikhlas melakukan kegiatan untuk ikut serta memberikan pelayanan masyarakat dalam bidang tertentu sebagai upaya meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, contohnya adalah partai politik.

Di samping itu, media masa juga dapat dikatakan sebagai sebuah institusi. Di mana, institusi media berkaitan dengan aspek kelembagaan dari suatu media. Dalam aspek ini dibicarakan hal yang berkaitan dengan struktur organisasi, kerjasama, motivasi, dan profesionalisme. Media masa disebut sebagai institusi sosial. Media massa adalah sebuah institusi sosial yang kompleks. Media massa mencakup beragam aspek manajerial, sumber daya manusia profesional hingga aspek teknik. Media massa selalu berinteraksi dan dipengaruhi oleh organisasi sosial, ekonomi dan politik, serta peristiwa yang terjadi dalam masyarakat umumnya dan khalayak pada khususnya.

Beberapa saluran dalam menyalurkan kepentingan kelompok kepentingan dalam hal ini adalah media Massa seperti radio, surat kabar, serta majalah. Disamping itu juga terdapat saluran yang tidak kalah penting yaitu partai politik. Setiap kelompok kepentingan memiliki kesempatan

untuk menyalurkan kepentingan mereka melalui partai politik. Disamping itu saluran lainnya ialah birokrasi. Taktik *lobbying* termasuk penampilan dan penyampaian pernyataan di parlemen dan kegiatan semacam itu.

Keberhasilan kelompok kepentingan dalam menyalurkan kepentingan mereka didasarkan pada efektivitas kelompok kepentingan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kelompok kepentingan misalnya seperti kemampuan untuk menggerakkan dukungan, tenaga, kemampuan, jumlah anggota, kecakapan, serta politik. Disamping itu juga efektivitas kelompok kepentingan akan turut ditentukan oleh isu-isu yang sedang berkembang. Perbedaan struktur pemerintahan juga menentukan efektivitas kelompok kepentingan serta otonomi dan kebebasan yang didapat oleh setiap kelompok kepentingan.

Berdasarkan landasan teori tersebut maka dapat disimpulkan bahwa komunitas pertambangan di Australia termasuk kedalam kelompok asosiasional dimana kelompok asosiasional adalah kelompok kepentingan yang terbentuk berdasarkan kepentingan yang sama dari serikat pengusaha-pengusaha serta industrialis. Pengusaha-pengusaha tambang di Australia bergerak melalui komunitas pertambangan yang ada di Australia melalui saluran-saluran seperti misalnya demonstrasi, media massa serta partai politik untuk menyampaikan kepentingan mereka terkait usaha untuk menggagalkan gagasan *Resource Super Profit Tax* di Australia yang di gagas oleh Kevin Rudd pada tahun 2010. Kemampuan serta kemampuan politik dan banyaknya pengusaha di Australia yang memiliki media Massa maka mempermudah kelompok pertambangan dalam menyampaikan kepentingan mereka terhadap pemerintah di parlemen.

Kelompok kepentingan komunitas pertambangan mampu mempengaruhi pembuat keputusan politik dengan melakukan pendekatan dengan para elit politik secara individu dan tatap muka misalnya melalui taktik *lobbying* hingga lebih memudahkan komunitas tersebut

untuk berkomunikasi dan melakukan lobbying. Sebelum menjelaskan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh komunitas pertambangan penulis merasa penting untuk menjelaskan definisi dari lobby menurut bussiness dictionary.³

Definisi yang lebih luas mengenai *lobby* adalah suatu upaya informal yang dilakukan oleh satu pihak (perorangan, kelompok, Swasta, pemerintah) yang memiliki kepentingan tertentu untuk menarik dukungan dari pihak pihak yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang, sehingga target yang diinginkan tercapai. Pendekatan secara menurut pendapat ini lebih dikemukakan pada pihak pelobi dengan demikian dibutuhkan keaktifan untuk pelobi untuk menunjang kegiatan tersebut

Setelah menyimpulkan bahwa komunitas peretambangan merupakan kelompok kepentingan asosasional, serta menentukan saluran yang digunakan oleh komunitas pertambangan dan menentukan efektivitas yang dimiliki oleh kelompok kepentingan tersebut kemudian menentukan taktik atau upaya-upaya yang dilakukan oleh komuniats pertambangan dalam menggagalkan gagasan Resource Super Profit Tax. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

1. Melalui saluran demonstrasi yaitu komunitas pertambangan di Australia menggerakkan masyarakat Australia untuk melakukan tindak demonstrasi. Di samping itu juga komunitas pertambangan melakukan kampanye melalui media massa untuk menggalang dukungan dari masyarakat Australia. Baik itu menggunakan media cetak atau elektronik. Apalagi dengan kemajuan sistem informasi serta kekuatan media massa yang semakin besar memberikan kesempatan bagi komunitas pertambangan dalam menggalang dukungan secara lebih muda.

2. Melalui saluran hubungan pribadi yaitu dimana terdapat sekitar 183 anggota *lobby register* Australia yang memiliki akses terhadap internal pemerintahan. Baik itu karena mereka

³ Business Dictionary. (n.d.). *What is lobbying? Definition and meaning - BusinessDictionary.com*. Retrieved from BusinessDictionary: <http://www.businessdictionary.com/definition/lobbying.html>

sebelumnya pernah berkerja di pemerintahan kemudian bergabung bersama komunitas pertambangan atau bahkan sebaliknya, dimana orang-orang yang sebelumnya berkerja untuk komunitas atau memilii latar belakang pertambangan kemudian berkerja di bidang pemerintahan. Dengan saluran pribadi ini akan memudahkan komunitas pertambangan dalam melakukan proses *lobby* terhadap keputusan politik yang diambil oleh pembuat keputusan karena mereka telah memiliki relasi yang baik antara satu sama lain.

3. Melalui saluran formal dan institusional. Dimana komunitas pertambangan melakukan kampanye lewat media massa yaitu seperti Koran, televisi, serta beberapa media penyiaran yang ada di Australia seperti berita-berita dan juga melalui channel youtube. Di samping menggalang dukungan melalui media massa saluran lain yang digunakan adalah saluran institusional lain. Saluran institusional yang dimaksud adalah partai politik. Partai politik juga di manfaatkan oleh komunitas pertambangan dalam menyampaikan kepentingan mereka. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan suntikan dana terhadap partai-partai yang ada di Australia. Seperti Partai-partai yang tersohor dan berkuasa di Australia misalnya Partai Liberal serta partai yang tengah berkuasa yaitu Partai Buruh

E. HIPOTESIS

Upaya upaya dari kelompok tambang menjadi negara utama penyebab RSPT gagal diterapkan. Upaya-upaya komunitas pertambangan dalam menggagalkan gagasan Resource Super Profit Tax tersebut antara lain

1. Melakukan aksi demonstrasi untuk menyuarakan kepentingan perusahaan-perusahaan pertambangan terkait dengan gagasan RSPT. Aksi demonstrasi yang cukup terkenal adalah aksi demonstrasi yang terjadi di Perth pada juni 2010.
2. Melakukan taktik lobbying yaitu bertujuan untuk menyampaikan informasi terhadap pembuat keputusan tentang dampak negatif yang akan di dapatkan apabila RSPT tetap di terapkan.
3. Menggalang dukungan melalui media Massa baik elektronik ataupun cetak, Di samping itu komunitas pertambangan juga memberikan suntikan dana terhadap partai-partai politik di Australia.

F. JANGKAUAN PENULISAN

Dalam pembahasan skripsi ini, jangkauan penulisan akan mengambil kurun waktu pada masa kepemimpinan Rudd khususnya pada tahun 2007-2010 dimana pada tahun 2007 Rudd terpilih menjadi Perdana Menteri Australia. Kemudian pada tahun 2010 dimana Rudd mencanangkan kebijakan RSPT.

G. METODE PENGUMPULAN DATA

Dari rumusan masalah dan pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis membutuhkan data baik primer maupun sekunder untuk menganalisis kekuatan politik yang dimiliki oleh komunitas pertambangan Australia untuk mempengaruhi kebijakan. Metode yang dipergunakan adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang mendeskripsikan keadaan atau fakta-fakta, kemudian dicari relevansi antara fakta tersebut, selanjutnya dianalisa dengan teori yang ada. Dalam pencarian data, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, seperti majalah, jurnal, surat kabar, internet, dan sumber lain yang memuat informasi tentang perkembangan pertambangan Australia serta perpolitikan Australia, dan fenomena lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB 1 Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari: pengantar, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesa, Jangkauan Penulisan, Metode Pengumpulan data, dan Sistematika penulisan.

BAB 2 Dalam pembahasannya penulis akan menyinggung tentang pertambangan di Australia serta pajak pertambangan di Australia disamping itu juga akan menjelaskan tentang resource super profit tax

BAB 3 Akan menjelaskan tentang pengaruh pertambangan bagi perekonomian Australia serta menjelaskan tentang kelompok pertambangan hingga kemudian pro dan kontra terkait rencana penerapan RSPT

BAB 4 Akan memberikan penjelasan mengenai upaya-upaya apa yang di lakukan oleh komunitas pertambangan di Australia untuk melawan kebijakan Kevin Rudd terkait rencana kenaikan pajak tambang di Australia.

BAB 5 Merupakan bagian kesimpulan dari penelitian ini. Bagian ini berisi kesimpulan yang di dapat oleh penulis setelah melakukan eksplorasi mendalam mengenai kekuatan politik yang di miliki oleh kelompok kepentingan komunitas pertambangan Australia serta pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah pada masa kepemimpinan Kevin Rudd.